

**PERAN JICA (JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY)
DALAM PENGEMBANGAN KOMODITAS SUTRA
DI SULAWESI SELATAN**



SKRIPSI

*Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana
pada Prodi Ilmu Hubungan Internasional*

Oleh:

MUH. SARIF

4518023017

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS BOSOWA MAKASSAR
2023**

HALAMAN PENGESAHAN

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Bosowa, tersebut namanya di bawah ini :

Judul : Peran JICA (*Japan International Cooperation Agency*) dalam pengembangan komoditas sutera di Sulawesi selatan

Nama Mahasiswa : Muh. Sarif

Nomor Stambuk : 4518023017

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Jurusan : Ilmu Hubungan Internasional

Telah diperiksa dan dinyatakan memenuhi syarat untuk mendapatkan gelar sarjana (S1) pada Program Studi Ilmu Hubungan Internasional pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Bosowa Makassar.

Makassar, 09 Februari 2023

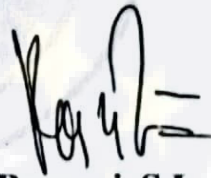
Menyetujui ;

Pembimbing I

Pembimbing II



Zulkhair Burhan, S.Ip., M.A.
NIDN. 0903048101



Dr. Rosnani, S.Ip., M.A.,
NIDN. 0930018001

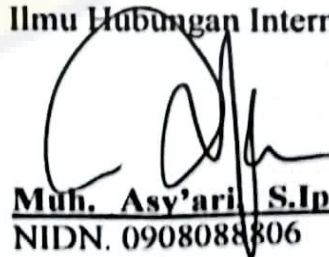
Mengetahui,



Dekan FISIP
Universitas Bosowa Makassar

Dr. A. Burchanuddin, S.Sos., M.Si
NIDN. 0905107005

Ketua Jurusan
Ilmu Hubungan Internasional



Muh. Asy'ari, S.Ip., M.A.
NIDN. 0908088806

HALAMAN PENERIMAAN

Pada hari Kamis Tanggal Sembilan Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga Dengan Judul Skripsi **Peran JICA (Japan International Cooperation Agency) Dalam Pengembangan Komoditas Sutera Di Sulawesi Selatan**

Nama : Muh. Sarif
Nomor Stambuk : 4518023017
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional

Telah diterima oleh Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bosowa Makassar Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana (S1) pada Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

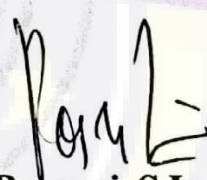
Makassar, 09 Februari 2023

Pengawas Umum:


Dr. A. Burchanuddin, S.Sos., M.Si

Panitia Ujian :


Zulkhair Burhan, S.Ip., M.A.
Ketua


Dr. Rosnani, S.Ip., M.A.
Sekretaris

Tim Penguji :

1. Zulkhair Burhan, S.Ip., M.A
2. Dr. Rosnani, S.Ip., M.A
3. Arief Wicaksono, S.Ip., M.A
4. Ayu Kartika J.T, S.Ip., M.A


(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :Muh. Sarif

Program Studi :Ilmu Hubungan Internasional

Judul Skripsi :Peran JICA (*Japan International Cooperation Agency*)
Dalam Pengembangan Komoditas Sutera Di Sulawesi Selatan

Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar hasil karya sendiri bukan dari orang lain, baik sebagian ataupun seluruhnya. Pendapat ahli, dan rujukan lain (Penelitian sebelumnya, dan Jurnal terdahulu) ini dikutip atau dirujuk berdasarkan Kode Etik Ilmiah.

Apabila karya ilmiah atau penulisan skripsi ini terbukti merupakan duplikat ataupun plagiasi dari hasil karya penulisan lain atau dengan sengaja mengajukan karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar dan sanksi hukum yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat sebagai pertanggungjawaban ilmiah tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun juga.

Makassar, 09 Februari 2023

Penulis,



Muh. Sarif

ABSTRAK

Dalam pengembangan sutra di Sulawesi selatan, pemerintah bersama dengan JICA menyusun sebuah konsep kerjasama pembangunan industri sutra yang melibatkan beberapa kabupaten diantaranya, kabupaten Soppeng, Enrekang, Sidrap dan Wajo. Serta meluncurkan sebuah program “gerakan pembangunan ekonomi masyarakat” (GERBANG EMAS) yang dimana salah satu targetnya yaitu pengembangan industri sutra Sulawesi selatan Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana peran JICA dalam pengembangan komoditas sutra sebagai salah satu perpanjangan tangan pemerintah Jepang dalam membantu Negara berkembang.

Penelitian ini juga bertujuan mengidentifikasi serta menganalisis bantuan JICA dalam pengembangan komoditas sutra di Wajo Sulawesi selatan. dan lebih focus membahas proyek kerjasama JICA dan pemerintah Sulsel dalam memfasilitasi pengembangan industri lokal Sulawesi selatan. penulisan skripsi ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, teknik penelitian yang digunakan telaah pustaka adapun untuk menganalisis data, penulis menggunakan teknik analisis kualitatif Dalam kerjasama ini memiliki beberapa kegiatan utama antara lain, meningkatkan strategi pemabangunan industri Sulawesi selatan dan menyusun peraturan perundang-undangan tentang pembangunan industri, serta melakukan pelatihan mengenai keuangan, pemasaran produk dan manajemen produk. Dengan mendatangkan beberapa tenaga ahli dan melakukan pelatihan dalam pengembangan produk yang berbasis lokal. dari data bps kab. Wajo 2014-2018 terjadi peningkatan pada unit usaha, tenaga kerja, serta nilai produksinya. Dalam penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa JICA (Japan international cooperation agency) telah melakukan kerjasama teknis dengan memberikan berupa bantuan teknis dan pelatihan dalam proyek fasilitasi pengembangan industri yang berbasis lokal di Wajo Sulawesi selatan. serta bekerjasama dengan pemerintah Sulawesi selatan meluncurkan sebuah program yaitu “Gerakan Pembangunan Ekonomi Masyarakat” (GERBANG EMAS) yang salah satu targetnya yaitu pengembangan industri sutra Sulawesi selatan.

Kata Kunci : JICA (*Japan interational cooperation agency*), industry sutra, pemerintah Sulawesi Selatan.

ABSTRACT

In the development of silk in South Sulawesi, the government together with JICA developed a cooperation concept for the development of the silk industry which involved several regencies including Soppeng, Enrekang, Sidrap and Wajo. As well as launching a program "community economic development movement" (GERBANG EMAS) in which one of the targets is the development of the South Sulawesi silk industry.

This research also aims to identify and analyze JICA's assistance in the development of silk commodities in Wajo, South Sulawesi. and more focus on discussing JICA's cooperation project and the government of South Sulawesi in facilitating the development of local South Sulawesi industries. writing this thesis using a qualitative descriptive method, research techniques used literature review as for analyzing data, the authors used qualitative analysis techniques. as well as conducting training on finance, product marketing and product management. By bringing in several experts and conducting training in local-based product development. from district bps data. Wajo 2014-2018 there was an increase in business units, labor, and production values. In this study the authors concluded that JICA (Japan international cooperation agency) had conducted technical cooperation by providing technical assistance and training in local-based industrial development facilitation projects in Wajo South Sulawesi. and in collaboration with the government of South Sulawesi launched a program namely the "Community Economic Development Movement" (GERBANG EMAS), one of the targets of which is the development of the South Sulawesi silk industry.

Keywords : JICA (*Japan interational cooperation agency*), the silk industry, the government of South Sulawesi.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim.

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul *Peran JICA (Japan International Cooperation Agency) Dalam Pengembangan Komoditas Sutra Di Sulawesi Selatan* dengan baik. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada Rasulullah SAW yang telah mengantarkan manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini. Skripsi ini peneliti persembahkan untuk kedua orangtua peneliti, Ayahanda tercinta Bahtiar S,Pd dan Ibunda tercinta putri dan semua saudara saya. Penyusunan skripsi ini juga dimaksudkan untuk memenuhi sebagian syarat-syarat guna mencapai gelar Sarjana pada Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bosowa.

Peneliti menyadari bahwa selama proses penelitian, peneliti mengalami begitu banyak kendala dan halangan hingga penelitian penelitian ini tidak dapat terselesaikan tanpa dukungan dari berbagai pihak baik moril maupun materil. Oleh karena itu, peneliti ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini hingga dapat dirampungkan terutama kepada:

1. Bapak Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bosowa Dr. A. Burchanuddin, S.Sos., M.Si. beserta jajarannya.
2. Bapak Ketua Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Muh. Asy'ari, S.Ip., M.A.

3. Bapak Zulkhair Burhan, S.Ip., MA. sebagai Pembimbing I dan Ibu Rosnani, S.IP., MA sebagai Pembimbing II.
4. Seluruh Staff dan Dosen Prodi Ilmu Hubungan Internasional atas segala ilmu yang telah diberikan dari semester awal hingga akhir.
5. Saudara-saudara saya Arash 18 yang telah setia menemani dalam setiap perjalanan.
6. Kepada seluruh Keluarga Besar KEMA FISIP UNIBOS yang telah mengajarkan arti berproses, belajar, memberi dukungan, memberi bantuan hingga do'a untuk bisa menyelesaikan studi.
7. Teman – Teman KKN Angkatan – 52 Universitas Bosowa, di Desa Tabo-Tabo, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep. Kalian keren dan luar biasa
8. Seluruh rekan seperjuangan yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu

-Terimakasih-

Peneliti

MUH. SARIF

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PENERIMAAN	iii
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang	1
B. Batasan dan Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	5
D. Kerangka Konseptual	5
E. Metode penelitian	7
F. Rencana sistemanitika pembahasan	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Kerjasama pembangunan internasional	9
B. Penelitian terdahulu	12
BAB III GAMBARAN UMUM	14
A. Wajo dan Industri Tenun	14
B. JICA (<i>Japan international cooperation agency</i>)	22
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN	38
A. Kerjasama harus diberikan kepada negara berkembang.....	38
B. Bantuan harus kondusif bagi kemajuan ekonomi atau kemajuan standar hidup masyarakat.....	39
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	42
A. Kesimpulan	42
B. Saran	42
DAFTAR PUSTAKA	43

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Industri tenun sutera di Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan merupakan sektor yang dominan diantara industri lainnya. Provinsi Sulawesi Selatan merupakan sentral industri sutera yang terbesar di Indonesia, sementara Kabupaten Wajo memiliki unit usaha tenun terbanyak di antara kabupaten lainnya. Industri tersebut masih berupa usaha rumah tangga (home industry). Kabupaten Wajo yang mempunyai julukan sebagai “Kota Sutera” merupakan industri rumah tangga yang bertumbuh kembang dan berevolusi yang terlanjur menguasai hajat hidup sebagian besar masyarakat di Kabupten Wajo. Pekerjaan ini telah ditekuni oleh masyarakat secara turun temurun, yang dilakukan dengan menggunakan alat yang masih sederhana. peralatan yang digunakan oleh industri tenun ini adalah walida(gedongan) yang menghasilkan sarung sutera dan ATBM (Alat Tenun Bukan Mesin) yang menghasilkan kain sutera.

Ketergantungan kebutuhan benang impor dari Cina juga menjadi kendala industri dalam pengembangan pertenunan kain sutera Wajo. Industri ini hanya akan berlanjut bila pasokan benang sutera tetap tersedia. Untuk saat ini, ketersediaan bahan baku benang sutera dari Cina masih tetap berjalan lancar sehingga penenun sutera dapat berlangsung dengan baik. Industri tenun kabupaten wajo dalam beberapa tahun terakhir terjadi peningkatan dari tahun 2014-2018. Dan bisa dilihat pada table dibawah ini:

Tahun	Unit usaha	Tenaga kerja	Nilai Produksi
2014	5. 806	17. 396	Rp 144.270.165
2015			
2016	5. 940	18. 308	Rp 165.731.665
2017	6. 903	18. 510	Rp 165.944.325
2018	6. 116	18. 510	Rp 169.536.165

Sumber: badan pusat statistik kabupaten wajo 2014-2018.

Upaya dalam pengembangan komoditas sutra di Sulawesi selatan melibatkan beberapa lembaga atau stakeholder sebagai pembina, baik dari lembaga pemerintah maupun non pemerintah di tingkat nasional dan internasional. Masing-masing pihak menjalankan peran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Aktivitas persuteraan di Sulawesi selatan terbagi atas dua sektor yaitu sektor hulu meliputi budidaya murbei, konkon sampai ulat sutra, dan sektor hilir meliputi pemasaran industri. Para pihak yang terlibat antara lain departemen luar negeri dan perdagangan Australia (DFAT) yang mendanai KSI (Knowledge sector initiative) dalam program kebijakan yang berbasis pengetahuan di Sulawesi selatan. KSI sendiri merupakan kemitraan antara pemerintah Indonesia dan Australia. KSI mendukung pembuat kebijakan di Indonesia untuk mengembangkan kebijakan pembangunan dengan menggunakan penelitian serta ikut andil dalam penyempurnaan peraturan dan praktik yang mendukung penelitian berkualitas sehingga penggunaan bukti dalam penyusunan kebijakan menjadi lebih mudah.

Jepang juga tidak ikut ketinggalan dalam pengembangan sutra di Sulawesi selatan, melalui JICA (Japan International Cooperation Agency) menjajaki kerjasama teknis dengan pemerintah Sulawesi selatan dalam memfasilitasi pengembangan industri lokal. Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan

kapasitas Sulawesi selatan dalam rangka manufakturisasi sumber daya lokal melalui pengembangan dan penguatan klaster dengan memanfaatkan sumber daya lokal. Dalam kerjasama ini, JICA melihat perlunya formulasi rencana strategis pengembangan industri lokal, penguatan pelatihan para produsen, meningkatkan bagian-bagian dari industri untuk pengembangan. Dari banyaknya komoditas unggulan yang ada di Sulawesi selatan JICA memilih empat komoditas untuk penguatan diantaranya markisa, kakao marmer dan sutra. pengembangan industri lokal ini dibawah kerjasama industri-pemerintah-akademisi telah mendukung pembentukan kelembagaan dan kebijakan untuk promosikan strategi merek, penguatan sistem dukungan dan pola kegiatan untuk pengembangan produk ciri khas daerah seperti sirup markisa yang bebas adiktif, coklat yang menggunakan 100% kakao dari Sulawesi, produk sutra dengan pewarna alami, dan lain-lain.

JICA sendiri merupakan sebuah badan kerjasama internasional milik pemerintah Jepang dalam membantu Negara-negara berkembang dalam meningkatkan kerjasama internasional antara Jepang dengan Negara-negara lain. JICA bertugas memperkuat Sumber Daya Manusia (SDM), transfer teknologi dan pembangunan infrastruktur terhadap Negara-negara mitra melalui kerjasama teknis, pinjaman ataupun hibah sesuai dengan kebutuhan masing-masing Negara. Dalam melaksanakan misinya, ada banyak hal yang menjadi fokus jica dalam membantu Negara-negara berkembang antara lain, infrastruktur ekonomi yang masih berkembang, pengurangan tingkat kemiskinan, dan pemberdayaan sumber daya manusia dengan cara memfasilitasi pengembangan industri lokal yang ada di Sulawesi selatan.

Dalam pengembangan sutra di Sulawesi selatan, pemerintah bersama dengan JICA menyusun sebuah konsep kerjasama pembangunan industri sutra yang melibatkan beberapa kabupaten diantaranya, kabupaten Soppeng, Enrekang, Sidrap dan Wajo. Serta meluncurkan sebuah program “gerakan pembangunan ekonomi masyarakat” (GERBANG EMAS) yang dimana salah satu targetnya yaitu pengembangan industri sutra Sulawesi selatan. kerjasama tersebut untuk kegiatan industry dari hulu hingga hilir. Kabupaten soppeng dan kabupaten enrekang sebagai industry hulu yang dimana kab. Soppeng sebagai penghasil murbei, ulat sutra dan kepompong. Kabupaten enrekang sebagai pusat pemintalan benang, yang mendukung industri hilir yang berada di kabupaten sidrap dan wajo sebagai pusat pertenunan sutra.

Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas, peneliti berinisatif untuk dapat mengetahui tentang **“Peran Japan International Cooperation Agency (JICA) dalam pengembangan komoditas sutra di Sulawesi Selatan”**.

B. Batasan dan Rumusan Masalah

1. Batasan Masalah

Upaya pengembangan komoditas sutra di Sulawesi selatan membutuhkan skateholder atau pihak-pihak yang membantu dalam pengembangan komoditas sutra baik dari segi kebijakan, pelatihan maupun bantuan teknis lainnya. Kerjasama teknis pemerintah Sulawesi selatan dengan JICA sudah berlangsung sejak lama namun dalam mempermudah pembahasan penulis membatasi sejauh mana JICA berperan dalam pengembangan komoditas sutra di Sulawesi selatan.

2. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan dalam penulisan ini ialah: bagaimana peran JICA dalam pengembangan komoditas sutra di Sulawesi selatan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana peran JICA dalam pengembangan komoditas sutra di Sulawesi selatan sebagai perpanjangan tangan jepang dalam membantu meningkatkan perekonomian, pengurangan kemiskinan, dan peningkatan sumber daya manusia dengan memfasilitasi industri lokal di Sulawesi selatan.

2. Kegunaan penelitian

- a. Sebagai syarat dalam menyelesaikan studi S1
- b. Diharapkan mampu memberikan sumbangsi dalam studi hubungan internasional khususnya pada kajian kerjasama pembangunan internasional.
- c. Diharapkan dapat memberikan kontribusi pengetahuan serta pemahaman terkait peran JICA (*Japan iternationa cooperation agency*) dalam pengembangan komoditas sutra di Sulawesi selatan.

D. Kerangka konseptual

Kerjasama pembangunan internasional

Menurut Stephan Klingebiel, kerja sama pembangunan adalah upaya yang bertujuan membantu negara lain dalam meningkatkan sektor ekonomi

dan sosialnya. Dalam bukunya, badan Asisten Komite Pembangunan dalam Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) berperan untuk mengklasifikasikan negara penerima berdasarkan beberapa kriteria agar sebuah bantuan internasional dapat didefinisikan sebagai kerja sama pembangunan, yaitu:

1. Kerja sama harus diberikan kepada negara berkembang. Semenjak aspek sosio-ekonominya merupakan sektor yang rentan di berbagai negara berkembang, maka OECD melakukan pendataan negara tersebut tiap 3 tahun berdasarkan PNB nya. Hal tersebut bertujuan untuk mengategorikan negara berkembang dari negara maju agar penerimaan bantuan dapat tepat sasaran.
2. Bantuan harus kondusif bagi kemajuan ekonomi atau kemajuan standar hidup masyarakat. Adanya bantuan tersebut haruslah ditujukan kepada lapisan masyarakat yang masih mengalami kekurangan, dengan harapan akan meningkatkan standar hidup serta dapat mengentaskan masalah kemiskinan.
3. Bantuan harus terdiri dari hibah atau pinjaman. Hibah merupakan bantuan yang bersifat sebagai hadiah (tidak dapat dikembalikan), dan sebuah pinjaman harus meliputi setidaknya 25% dana hibah sehingga negara peminjam dapat merasakan keringanan atas pinjaman tersebut (baik dalam bentuk durasi pengembalian hutang atau tarif bunga yang rendah).

Lebih lanjut, adanya bantuan internasional pada negara-negara berkembang tidak hanya semata mata didasarkan atas kepentingan suatu

negara baik secara politis ataupun ekonomi. Namun terdapat suatu tujuan yang lebih luas lagi yakni untuk mewujudkan poin-poin dari Millennial Development Goals (MDGs) atau yang sekarang dikenal dengan sebutan Sustainable Development Goals (SDGs). Menghubungkan bantuan internasional untuk memenuhi cita-cita SDGs menjadi penting dikarenakan hal tersebut merupakan suatu agenda internasional dan akan membuat prioritas pemerintahan suatu negara agar memanfaatkan dana bantuan untuk kepentingan perwujudan nilai pokok tersebut.

E. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini bersifat deskriptif yang digunakan oleh peneliti. Hal tersebut berkaitan dengan masalah dalam variabel penelitian ini.

2. Jenis dan sumber data

Jenis dan sumber data yang digunakan adalah data sekunder atau hasil dari penelitian sebelumnya, serta data yang telah disiapkan oleh lembaga pemerintah dengan mencari di website maupun jurnal-jurnal ilmiah.

3. Teknik pengumpulan data

Teknik dan pengumpulan data yang digunakan adalah telaah pustaka, dengan menelusuri berbagai literatur, buku teks, dokumen resmi, jurnal ilmiah, dan majalah yang berkaitan dengan topik penelitian.

4. Teknik analisis data

Teknis analisis data yang digunakan adalah deskriptif dengan metode kualitatif. Hal ini dikarenakan data-data yang diperoleh terdiri dari susunan kata-kata bukan angka. Kemudian data tersebut diolah untuk menguraikan dan menganalisis peran jica dalam pengembangan komoditas sutra di Sulawesi selatan.

F. Rencana Sistemanitika Pembahasan

Bab 1:pembahasan

Dalam bab pembahasan ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan dan batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konsep dan metode penulisan.

Bab II: Tinjauan pustaka

Dalam bab ini yang berisi mengenai penelusuran kepustakaan dan literatur mengenai konsep kerjasama pembangunan internasional.

Bab III: Gambaran Umum

Pada bab ini membahas mengenai objek penelitian, yakni tentang Kabupaten Wajo dan industri tenun dan JICA (Japan international cooperation agency)

Bab IV: Analisis dan Pembahasan

Pada bab ini membahas mengenai hasil penelitian dengan model kerjasama pembangunan internasional apa yang telah dilakukan oleh JICA (Japan international cooperation agency) terhadap pengembangan komoditas sutra di Sulawesi Selatan

BabV : Penutup

Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran mengenai objek penelitian

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerjasama pembangunan internasional

Dalam studi Hubungan Internasional, konsep kerjasama pembangunan menjadi konsep yang penting setelah perang dunia ke dua. Hal ini dikarenakan setelah PD II menimbulkan berbagai krisis ekonomi. Kehancuran yang ditimbulkan terutama di Eropa membuat diperlukannya persiapan pendirian Bank Dunia untuk rekonstruksi serta Dana Moneter Internasional guna menciptakan peluang pendanaan dan forum politik yang sesuai. Konsep pembangunan juga dijadikan sebagai kebebasan serta menjadi jembatan dari ekonomi pembangunan ke yang lebih menjanjikan dari sudut pandang teoretis-metodologis-ekonomi politik pembangunan.

Sementara itu menurut Stephan Klingebiel kerjasama pembangunan adalah upaya untuk membantu Negara-negara berkembang dalam upaya membuat kemajuan sosial dan ekonomi sebuah Negara. Para Negara donor pembangunan yang tergabung dalam OECD (organisasi kerjasama ekonomi pembangunan) memiliki komite pembangunan sendiri yang disebut komite bantuan pembangunan (*Development Assistance Committee/DAC*). Yang secara internasional disebut sebagai bantuan pembangunan resmi (*official development assistance/ODA*). Menurut Stephan Klingebiel dalam bukunya "*what is development cooperation?*" OECD (*Organization for Economic Co-operation and Development*) berperan untuk mengklasifikasikan Negara penerima berdasarkan

beberapa kriteria agar sebuah bantuan internasional dapat didefinisikan sebagai kerjasama pembangunan internasional. Kriteria tersebut antara lain:

1. Kerja sama harus diberikan kepada negara berkembang. Semenjak aspek sosio-ekonominya merupakan sektor yang rentan di berbagai negara berkembang, maka OECD melakukan pendataan negara tersebut tiap 3 tahun berdasarkan PNB nya. Hal tersebut bertujuan untuk mengkategorikan negara berkembang dari negara maju agar penerimaan bantuan dapat tepat sasaran.
2. Bantuan harus kondusif bagi kemajuan ekonomi atau kemajuan standar hidup masyarakat. Adanya bantuan tersebut haruslah ditujukan kepada lapisan masyarakat yang masih mengalami kekurangan, dengan harapan akan meningkatkan standar hidup serta dapat mengentaskan masalah kemiskinan
3. Bantuan harus terdiri dari hibah atau pinjaman. Hibah merupakan bantuan yang bersifat sebagai hadiah (tidak dapat dikembalikan), dan sebuah pinjaman harus meliputi setidaknya 25% dana hibah sehingga negara peminjam dapat merasakan keringanan atas pinjaman tersebut (baik dalam bentuk durasi pengembalian hutang atau tarif bunga yang rendah).

Lebih lanjut, adanya bantuan internasional pada negara-negara berkembang tidak hanya semata-mata didasarkan atas kepentingan suatu negara baik secara politis ataupun ekonomi. Namun terdapat suatu tujuan yang lebih luas lagi yakni untuk mewujudkan poin-poin dari Millennial Development Goals (MDGs) atau yang sekarang dikenal dengan sebutan Sustainable Development

Goals (SDGs). Menghubungkan bantuan internasional untuk memenuhi cita-cita SDGs menjadi penting dikarenakan hal tersebut merupakan suatu agenda internasional dan akan membuat prioritas pemerintahan suatu negara agar memanfaatkan dana bantuan untuk kepentingan perwujudan nilai pokok tersebut.

Terdapat beberapa aspek agar bantuan internasional dapat mewujudkan pelaksanaan pembangunan berkelanjutan secara efektif yakni:

1. Penganggaran dana yang berkelanjutan. Hal ini menjadi salah satu yang krusial agar proses pembangunan dapat berjalan secara stabil, karena tanpanya proses untuk membangun kehidupan masyarakat yang lebih baik secara berkelanjutan tidak akan tercapai.
2. Pemrograman yang berkelanjutan. Perencanaan program yang jelas akan dapat berdampak pada keberhasilan proses pembangunan secara jangka panjang. Maka dari itu, akan menjadi penting untuk merancang serta melakukan pemetaan program secara efektif agar tidak terjadi miscalculasi.
3. Operasionalisasi yang berkelanjutan. Setelah adanya pembangunan, maka operasionalisasi harus dilakukan se-sustainable mungkin dalam jangka panjang. Akan menjadi sia-sia jika pembangunan yang telah dilakukan mengalami inefisiensi serta inefektivitas pada fungsinya.
4. Lingkungan yang berkelanjutan. Program pembangunan yang berkelanjutan hendaknya tidak bersifat destruktif terhadap lingkungan, karena keseimbangan ekologi menjadi sangat penting bagi kehidupan manusia kedepannya semenjak ketergantungan pada alam masalah tinggi terutama di negara-negara berkembang.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini tidaklah terlepas dari berbagai penelitian yang dilakukan sebelumnya. Penelitian terdahulu sangatlah penting dalam sebuah penelitian sebagai rujukan dalam menghindari adanya penelitian yang sama. Oleh karena itu peneliti telah mengumpulkan beberapa kajian yang relevan untuk merujuk arah dalam penelitian ini. Penelitian pertama, skripsi dari Anwar andriana yang berjudul “ analisis bantuan JICA (*Japan international cooperation agency*) pada bidang kesehatan di Sulawesi selatan”. Dalam tulisannya, penulis membahas mengenai JICA sebagai bentuk kerjasama bilateral Indonesia dan Jepang serta fokus membahas bantuan dalam program prima kesehatan yang dilakukan oleh JICA dan pemerintah Sulawesi selatan. hasil dari penelitian ini adalah peningkatan layanan kesehatan dasar atau *primary health care improvement* (PHCI) dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat yang berbasis pada kesadaran sendiri, inisiatif serta dapat mengidentifikasi permasalahan dan menyelesaikan masalah dengan cara mereka sendiri. Yang menjadi prioritas pada proyek ini adalah penyediaan air bersih, kegiatan posyandu dan sanitasi lingkungan.

Penelitian kedua, jurnal dari Rizqi rahman saputra yang berjudul “bantuan *japan international cooperation agency* (JICA) dalam mengatasi sampah di Balikpapan tahun 2014-2017” penelitian ini membahas tentang isu lingkungan yang sangat mengkhawatirkan di Indonesia khususnya masalah sampah yang terjadi di Balikpapan. Kerjasama teknis antara Indonesia dengan JICA yang telah disepakati oleh Menteri Lingkungan Hidup Jepang,

Kouichi Yamamoto bersama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Siti Nurbaya Bakar dengan mendatangkan tenaga ahli Jepang dan didampingi tenaga dari kota Balikpapan itu sendiri dalam pelatihan dan sosialisasi mengenai masalah sampah. Dalam penelitian ini JICA melalui program *support for environment* yang mengimplementasikan promosi 3R, *reduce* (mengurangi), *reuse* (menggunakan kembali), dan *recycle* (mengolah kembali melalui pendekatan berbasis masyarakat).

Penelitian ketiga, skripsi Sitti Navisah yang berjudul “peran *Japan international cooperation agency* (JICA) dalam proses rekonstruksi infrastruktur daerah pasca tsunami di Palu tahun 2018” penelitian ini membahas tentang pembangunan infrastruktur pasca bencana alam yang terjadi di Palu. Banyak pihak yang terlibat dan menyalurkan bantuan luar negerinya pasca tsunami yang terjadi di Palu tahun 2018. Kebanyakan Negara atau organisasi yang terlibat hanya menyalurkan bantuan luar negerinya berupa hibah berbeda dengan JICA yang memberikan bantuan jangka panjang dengan pendekatan *build back better* yang bukan hanya sekedar *rebuild* melainkan memberikan bantuan teknis berupa tenaga ahli dalam membangun Palu berdasarkan *masterplan* untuk rehabilitasi dan rekonstruksi.

BAB III

GAMBARA|N UMUM

A. Wajo dan Industri Tenun

1. Wajo

Terbentuknya Kabupaten Wajo terdiri dari beberapa fase perkembangan masyarakat yang bernama Lampulunge (kampung yang berada didekat Danau Lampulung) dan daerah inilah yang menjadi asal mula terjadinya Kerajaan Cinnottabi'. Dalam sebuah kisah, sekitar abad ke XV mengisahkan bahwa seorang putri mahkota Kerajaan Luwu yang bernama We Taddamppalie terpaksa disingkirkan dari kerajaannya dikarenakan mengidap penyakit kulit (kusta) yang ditakutkan akan menular. We Taddamppalie dihanyutkan (merdeka) yang disebut Cinnottabi'. Putri tersebut kemudian membangun rumah di sebuah pohon kayu besar yang memiliki daun yang rindang yang disebut dengan pohon Bajo dan dari nama inilah muncul asal mula nama Wajo.

Dalam perkembangannya, daerah ini menjadi makmur dan rakyat yang semakin bertambah. Namun akhirnya raja-raja dari Tellu Kajurue berinisiatif untuk mempersatukan daerah mereka tersebut, mereka akhirnya berkumpul di bawah pohon Bajo untuk membicarakan masalah pengangkatan raja yang akan memimpin ketiga negara bagian ini. Dalam pertemuan ketiga, raja tersebut menghasilkan perjanjian sistem pemerintahan yang akan mengatur hubungan kekuasaan antara raja, para pejabat kerajaan, serta hak-hak kebebasan rakyat berdasarkan yaitu, adat dan hukum

adat yang lahir dari persetujuan bersama antara raja, penguasa adat dan rakyat. Dari pertemuan itu kemudian menyepakati bahwa La Tenribali (Arung Mataesso) yang juga sepupu dari raja-raja Tellu Kajurue yang diangkat menjadi Raja Wajo dan mendapatkan Gelar Batara Wajo sebab beliau dalam hal memerintah sangat bijaksana dan diharapkan mampu menjadikan Kerajaan Wajo lebih berkembang dan lebih demokratis.

2. Kondisi geografis

Kabupaten Wajo dengan Ibukota Sengkang, terletak di bagian tengah Provinsi Sulawesi Selatan dengan jarak 242 km dari Makassar Ibukota Provinsi Sulawesi Selatan mempunyai luas 2.506,19 km² atau 4,01% dari luas wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, terletak diantara 3° 39' → 4° 16' LS dan 119° 53' → 120° 27' BT yang berbatasan :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Luwu dan Kabupaten Sidrap.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Teluk Bone.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bone dan Kabupaten Soppeng.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Sidrap.

Dilihat dari Topografinya, Kabupaten Wajo terletak di tengah-tengah Provinsi Sulawesi Selatan dan berdasarkan fotografi Sulawesi yang dibagi 3 (tiga) Zone Utara, Tengah dan Selatan, maka Kabupaten Wajo terletak pada zone tengah yang merupakan suatu depresi yang memanjang pada arah laut tenggara dan terakhir merupakan selat. Menurut Iklim, Kabupaten Wajo

tergolong beriklim tropis yang termasuk type B dengan 29°C - 31°C atau suhu rata-rata 29°C siang hari. Daerah ini tahunnya berlangsung agak pendek yaitu rata-rata 3 (tiga) bulan yaitu Bulan April sampai dengan Bulan Juli, dan Bulan Agustus sampai dengan Bulan Oktober, curah hujan rata-rata 8.000 mm dengan 120 hari hujan.

Menurut peta geologi Indonesia, Kabupaten Wajo terdiri 3 (tiga) jenis batuan yaitu batuan vulkanik, sedimen, dan batuan pluton. Menurut peta eksplorasi Sulawesi Selatan, jenis tanah Kabupaten Wajo terdiri dari : Kabupaten Wajo dengan Ibukota Sengkang, terletak di bagian tengah Provinsi Sulawesi Selatan dengan jarak 242 km dari Makassar Ibukota Provinsi Sulawesi Selatan mempunyai luas 2.506,19 km² atau 4,01% dari luas wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, terletak diantara $3^{\circ} 39' \rightarrow 4^{\circ} 16' \text{ LS}$ dan $119^{\circ} 53' \rightarrow 120^{\circ} 27' \text{ BT}$ yang berbatasan :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Luwu dan Kabupaten Sidrap.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Teluk Bone.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bone dan Kabupaten Soppeng.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Sidrap.

Dilihat dari Topografinya, Kabupaten Wajo terletak di tengah-tengah Provinsi Sulawesi Selatan dan berdasarkan fotografi Sulawesi yang dibagi 3 (tiga) Zone Utara, Tengah dan Selatan, maka Kabupaten Wajo terletak pada zone tengah yang merupakan suatu depresi yang memanjang pada arah laut

tenggara dan terakhir merupakan selat. Menurut Iklim, Kabupaten Wajo tergolong beriklim tropis yang termasuk type B dengan 29°C - 31°C atau suhu rata-rata 29°C siang hari. Daerah ini tahunnya berlangsung agak pendek yaitu rata-rata 3 (tiga) bulan yaitu Bulan April sampai dengan Bulan Juli, dan Bulan Agustus sampai dengan Bulan Oktober, curah hujan rata-rata 8.000 mm dengan 120 hari hujan.

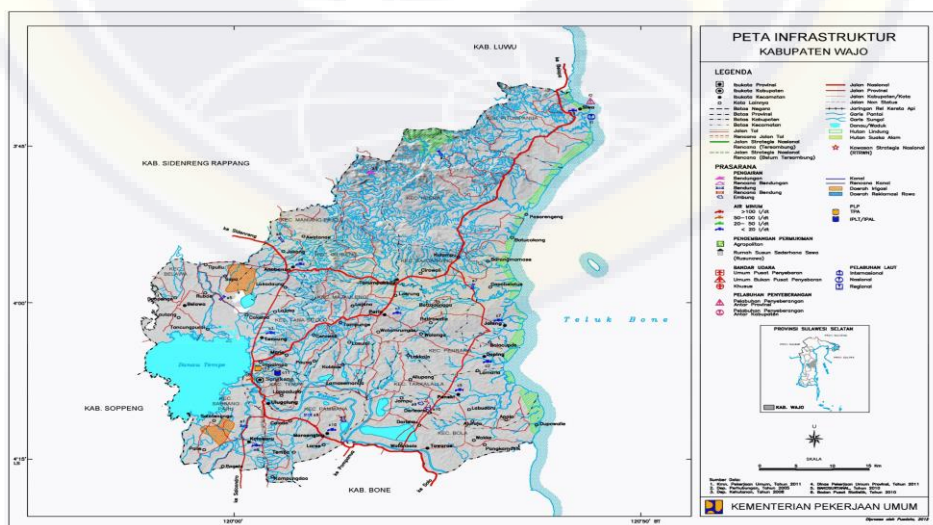
Menurut peta geologi Indonesia, Kabupaten Wajo terdiri 3 (tiga) jenis batuan yaitu batuan vulkanik, sedimen, dan batuan pluton. Menurut peta eksplorasi Sulawesi Selatan, jenis tanah Kabupaten Wajo terdiri dari :

1. Alluvial : Jenis tanah ini tersebar di seluruh kecamatan.
2. Clay : Jenis tanah ini terdapat pada kecamatan Pammana dan Takkalalla.
3. Podsolik : Jenis tanah ini terdapat pada kecamatan Maniangpajo, Tanasitolo, Tempe, Sajoanging, Majauleng, Belawa, Pitumpanua.
4. Mediteran : Jenis tanah ini terdapat pada kecamatan Tanasitolo, Maniangpajo, Pammana, dan Belawa.
5. Grumosal : Jenis tanah ini terdapat di kecamatan sabbangparu dan Pammana.

Karakteristik lahan dan potensi wilayah Kabupaten Wajo yang di dalam Khasanah Lontara Wajo diungkapkan sebagai daerah yang terbaring dengan posisi yang dikatakan "Mangkulungung ribulue Massulappe Ripottanange Mattodang Ritasi/Tappareng" yang artinya Kabupaten Wajo memiliki lahan 3 (tiga) dimensi yaitu:

1. Tanah berbukit yang berjejer dari Selatan Kecamatan Tempe ke Utara semakin bergunung utamanya di Kecamatan Maniangpajo dan Kecamatan Pitumpanua yang merupakan wilayah pembangunan hutan dan tanaman industri, perkebunan coklat, cengkeh, jambu mete serta pengembangan ternak
2. Tanah dataran rendah yang merupakan hamparan sawah dan perkebunan/tegalan pada wilayah bagian Timur, Selatan, Tengah, dan Barat. Danau Tepe dan sekitarnya serta hamparan laut yang terbentang sepanjang pesisir atau Teluk Bone di sebelah Timue merupakan potensi untuk pengembangan perikanan dan budidaya tambak.
3. Potensi sumber daya air yang cukup besar, baik air tanah maupun air permukaan yang terdapat di danau dan sungai-sungai yang ada seperti Sungai Bila, Sungai WalanaE, Sungai CenranaE, Sungai Gilireng, Sungai Siwa, san Sungai Awo merupakan potensi yang dapat dan akan dimanfaatkan untuk pengairan dan penyediaan air bersih.

Gambar 2.1
Peta Kabupaten Wajo



Tabel 2.2
Data Demografi Kabupaten Wajo

No.	Kode	Kecamatan	Luas (km ²)	Desa/ Kelurahan	Jumlah Penduduk (Tahun 2019)
1.	731301	Sabbangparu	132.75	15	33.709
2.	731302	Pammana	162.10	16	37.566
3.	731303	Takkalalla	179.76	13	23.860
4.	731304	Sajoanging	167.01	9	22.981
5.	731305	Majauleng	225.92	18	40.581
6.	731306	Tempe	38.27	16	79.878
7.	731307	Belawa	172.30	9	36.487
8.	731308	Tanasitolo	154.60	19	46.213
9.	731309	Maniangpajo	175.96	8	19.309
10.	731310	Pitumpanua	207.13	27	51.484
11.	731311	Bola	220.13	11	24.299
12.	731312	Penrang	154.90	10	19.366
13.	731313	Gilireng	147.00	9	13.796
14.	731314	Keera	368.36	10	29.926

Sumber: wajokab.go.id

3. Industri Tenun

Industri tenun sutera di Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan merupakan sektor yang dominan diantara industri lainnya. Provinsi Sulawesi Selatan merupakan sentral industri sutera yang terbesar di Indonesia, sementara Kabupaten Wajo memiliki unit usaha tenun terbanyak di antara kabupaten lainnya. Industri tersebut masih berupa usaha rumah tangga(home industry). Kabupaten Wajo yang mempunyai julukan sebagai “Kota Sutera” merupakan industri rumah tangga yang bertumbuh kembang dan berevolusi yang terlanjur menguasai hajat hidup sebagian besar masyarakat di Kabupten

Wajo. Pekerjaan ini telah ditekuni oleh masyarakat secara turun temurun, yang dilakukan dengan menggunakan alat yang masih sederhana. peralatan yang digunakan oleh industri tenun ini adalah walida(gedongan) yang menghasilkan sarung sutera dan ATBM (Alat Tenun Bukan Mesin) yang menghasilkan kain sutera. industri sutera di Sulawesi Selatan telah dikembangkan di 13 kabupaten yaitu Kabupaten Wajo, Enrekang, Bulukumba, Soppeng, Sidrap, Bone, Barru, Maros, Gowa, Toraja, Sinjai, Luwu Timur, dan Polewali Mandar. Namun pada masa ini hanya tiga kabupaten yang menjadi pusat pengembangan persuteraan iaitu, kabupaten Enrekang dan Soppeng yang menjadi pusat pengembangan tanaman mulberi (atau murbei), penternakan ulat sutera dan produksi kokon dalam sektor hulu, manakala Kabupaten Wajo sebagai pusat pertenunan dan penghasilan kain sutera dalam sektor hiliran.

Bahan dasar dari benang dalam pembuatan tenun sutra merupakan sutra dari kepompong yang dihasilkan dari larva ulat sutra murbei (*bombix mori*) yang dipelihara. Penenun di kabupaten Wajo dalam memproduksi kain sutra menggunakan beberapa alat tenun seperti, tenun gedongan, alat tenun mesin (ATM) dan alat tenun bukan mesin(ATBM). Penggunaan alat tenun gedongan sendiri telah lama digunakan oleh masyarakat wajo bahkan sampai saat ini juga masih menggunakan alat tersebut. Dalam pembuatan kain sutra ada beberapa tahap yang harus di lakukan antara lain:

1. Pengolahan benang

Material benang yang digunakan merupakan benang sutra *bombix moril Linnaeus* yang telah melawati tahap pemintalan. Para pengrajin juga

biasanya menggunakan benang emas dan perak untuk membentuk ragam hias.

2. Pewarnaan

Pewarnaan dapat dilakukan dengan dua cara yaitu celup dan colet. Dan pencelupan juga terdapat dua cara yaitu celup panas dan celup dingin. Penggunaannya ditentukan dari jenis pewarna yang akan digunakan dan intensitas warna yang ingin dihasilkan. Sementara penceoletan sendiri digunakan dalam membentuk ragam hias tenun ikat. Dengan cara mengoleskan langsung pewarna pada bagian-bagian benang yang ingin diwarnai.

3. Penghanian (massau) dan pencucukan

Proses penghanian dan pencucukan adalah proses mempersiapkan benang lungsi yang akan di tenun.

4. Penenunan (mattennung)

Penenunan adalah proses penyusunan benang pakan kedalam benang lungsi yang kemudian saling menyilang satu sama lain. selama proses penenunan setiap saat benang lungsi dan pakan harus dalam keadaan basah baik menggunakan kanji ataupun air perasan jeruk nipis. Hal tersebut dilakukan agar benang tidak kusut dan tetap awet salam proses penenunan berlangsung. Biasanya pengarajin dapat mengerjakan selembat sarung dalam waktu 2 minggu, namun tergantung juga dengan kegiatan sehari-hari dan kerumitan dari ragam hias atau motifnya.

5. Penyempurnaan

Setelah proses penenunan selesai pinggiran benang lungsi pada patekko dan na'pessa digunting lalu digulung hasil tenunan pada pessa dilapas. Dan setelah itu benang lungsi telah menjadi sebuah kain dan siap untuk dipasarkan.

B. JICA (*Japan international cooperation agency*)

JICA (*Japan Internation Cooperation Agency*) merupakan salah satu institusi resmi Jepang yang bertanggungjawab atas pelaksanaan dari serangkaian kerjasama teknis dengan negara-negara berkembang yang berdasarkan atas kesepakatan bilateral pemerintah masing-masing secara resmi.

1. ODA dan JICA

Sejak keikut sertaannya dalam *Colombo Plan* pada tahun 1954, pemerintah Jepang terus meningkatkan berbagai kerjasama dengan memanfaatkan dana dan teknologi yang dimilikinya melalui kerangka Bantuan Pembangunan Resmi atau yang dikenal dengan ODA (*Official Development Assistance*). Bantuan tersebut diberikan kepada negara yang dikategorikan sebagai negara berkembang dengan berbagai masalah yang dihadapi seperti kelaparan dan kemiskinan serta kurangnya pelayanan pendidikan dan kesehatan. Berbagai kerjasama teknik yang dilakukan oleh pemerintah Jepang dengan negara-negara lain termasuk Indonesia

Bantuan ODA tersebut diberikan kepada negara yang dikategorikan sebagai negara berkembang dengan berbagai masalah yang dihadapi seperti kelaparan dan kemiskinan serta kurangnya pelayanan pendidikan dan

kesehatan. Pada umumnya, motivasi pemberian bantuan ODA Jepang, selain untuk berkontribusi pada perdamaian dan pembangunan untuk masyarakat internasional, juga untuk membantu menjamin keamanan dan kemakmuran oleh Jepang sendiri. Sebagian besar motif pemberian bantuan ODA berbentuk bantuan ekonomi infrastruktur, disebabkan karena negara berkembang memerlukan sejumlah infrastruktur untuk melakukan perdagangan secara efektif dan untuk mengekstrak sumber daya alam di Asia.

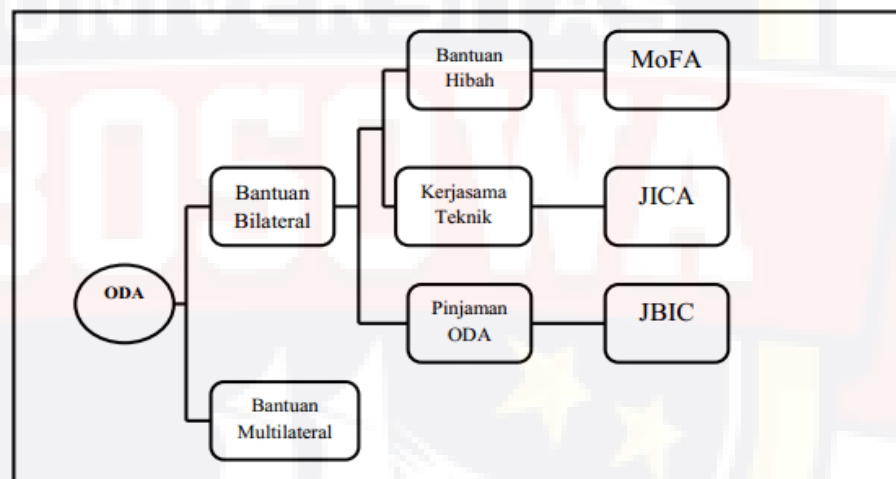
Dalam pelaksanaannya, ODA Jepang memiliki beragam bentuk kemitraan yaitu baik melalui institusi pemerintah, (LSM) lembaga swadaya masyarakat dan organisasi internasional lainnya dengan fokus kerjasama yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing pihak. ODA dalam kerangka kerjasama bilateral (ODA Bilateral), dimaksudkan untuk memberikan kontribusi dalam membina hubungan Jepang dengan masing-masing negara berkembang penerima bantuan yang dirancang berdasarkan kesepakatan bersama antara kedua belah pihak. Sedangkan ODA dalam kerangka kerjasama multilateral (ODA Multilateral), disalurkan melalui berbagai organisasi internasional dengan mempertimbangkan aspek dibutuhkannya pengetahuan khusus, adanya jaminan netralis politik serta memfasilitasi bantuan bagi negara-negara yang sulit dijangkau oleh Pemerintah Jepang

Bantuan dana ODA khususnya bantuan hibah dilaksanakan oleh MoFA (Ministry of Foreign Affairs of Japan), sedangkan pinjaman dana ODA dilaksanakan oleh JBIC (Japan Bank for International Cooperation) dan kerjasama teknis dilaksanakan oleh pemerintah Jepang sendiri. Namun karena

adanya upaya pemerintah Jepang untuk mendukung pembangunan SDM, maka dibentuklah sebuah organisasi internasional yaitu JICA (Japan International Cooperation Agency) yang berfungsi sebagai penanggung jawab pelaksanaan kerjasama teknis dengan negara-negara berkembang penerima bantuan berdasarkan kesepakatan bilateral antara pemerintah secara resmi. Untuk lebih jelasnya, berikut ini gambaran bentuk dan penyaluran bantuan ODA:

Bagan 3.1

Bentuk dan penyaluran bantuan ODA

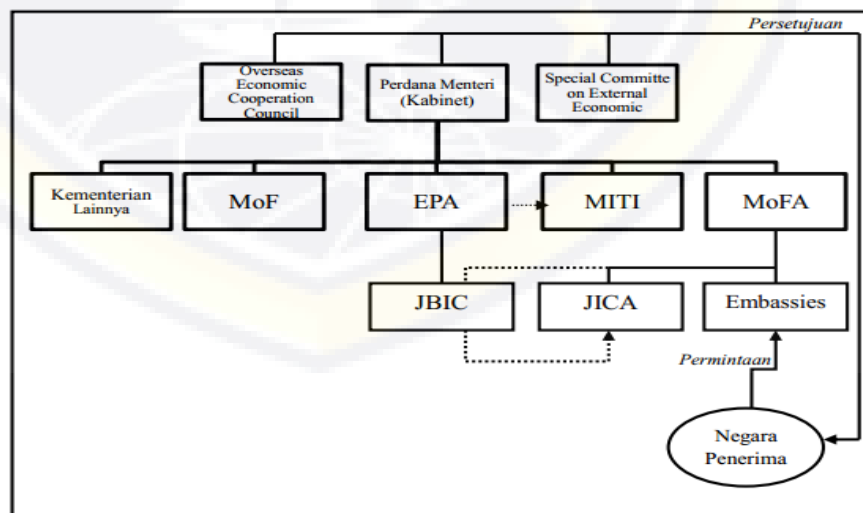


Sumber: Buletin JICA di Indonesia 2012, hal. 9.

Mekanisme formulasi kebijakan ODA telah berubah sebanyak tiga kali dimana terjadi semacam pengurangan atau penggabungan institusi yang terlibat, yaitu sebagai berikut: Pertama, pada tahun 1999, dimana OECF (sebagai badan penyalur ODA tipe pinjaman) digabungkan dengan ExportImport Bank (yang memberikan pinjaman kepada sektor swasta, baik di Jepang maupun di negara-negara berkembang termasuk Indonesia, menjadi JBIC (*Japan Bank for International Cooperation*). JBIC sendiri kemudian memiliki dua fungsi utama, yakni sebagai penyalur ODA pinjaman ke

negaranegara berkembang dan juga sebagai penyalur pinjaman ke sektor-sektor swasta (sebagai turunan fungsi Export-Import Bank). Kedua, pada tahun 2001, berupa reformasi pemerintahan, yang dalam kasus ODA, menggabungkan EPA (*Economic Planning Agency*) dengan MITI menjadi METI (*Ministry of Economy, Trade and Industry*). JBIC sendiri yang tadinya secara formalitas berada dibawah koordinasi EPA, kemudian dipindahkan menjadi dibawah koordinasi MoFA. Serta ketiga, pada tahun 2008, dimana JBIC yang terkait dengan penyaluran ODA pinjaman ke negara-negara berkembang bergabung dengan JICA, sebagai bentuk upaya Jepang untuk memfokuskan penyaluran ODA hanya pada satu institusi saja (kebijakan satu-atap). Sedangkan fungsi sebagai penyalur bantuan pinjaman ke sektor swasta masih tetap ada pada JBIC. Untuk lebih jelasnya perhatikan pada bagan berikut:

Bagan 3.2
Lembaga Negara dalam Formulasi Kebijakan ODA Jepang
(Beserta Perubahannya)



Keterangan:
 : Menjadi agen bawahan (dibawah koordinasi) Kementerian Tertentu
▶ : Masuk menjadi bagian dari Kementerian atau Institusi Tertentu

Dari bagan diatas dapat dilihat bahwa yang menjadi salah satu ciri khas dari sistem kebijakan ODA Jepang adalah bahwa ODA harus dimulai dari pengajuan dan permintaan calon negara penerima ODA Jepang. Kebijakan ini disebut dengan *yosei-shugi*, yang pada dasarnya juga merupakan bagian dari sistem *project-cycle*, yang secara garis besar terdiri dari tahap awal (pengajuan dan formulasi), tahap implementasi dan tahap evaluasi. Projectcycle untuk ODA jenis hibah dan pinjaman pada dasarnya sama, yang membedakannya hanyalah terletak pada instansi yang menyeleksi dan mengimplementasikannya, serta adanya proses lelang-tender untuk mengimplementasikan ODA nantinya, yang terdapat dalam ODA tipe pinjaman. Sedangkan untuk ODA tipe kerjasama teknis tidak ada projectcycle. Hal ini disebabkan karena kerjasama teknis hanya mengurus bidang pelatihan ataupun hal-hal yang berhubungan dengan teknis, bukan berupa proyek, seperti tipe ODA lainnya. Oleh karena itu kerjasama teknis bisa dikatakan hanyalah menjadi bagian dari proses *project-cycle* tersebut, khususnya dalam ODA tipe hibah.

Untuk tipe hibah sendiri *project-cyclenya* secara sederhana terdiri dari tahap awal yaitu tahap Application dan Project Design, tahap yang dimulai dengan adanya permintaan dan pengajuan formal dari negara berkembang kepada pemerintah Jepang melalui kantor-kantor perwakilannya seperti kedutaan besar maupun konsulat-konsulat yang terdapat di negara tersebut. Kemudian permintaan tersebut akan diproses dan dikirim ke Tokyo, biasanya oleh personil MoFA, yang terdapat di kantor-kantor perwakilan Jepang.

Setelah itu, pengajuan yang ada kemudian diseleksi dengan berbagai pengajuan lainnya. Penyeleksian dilakukan guna melihat pengajuan bantuan manakah yang terlebih dahulu akan diprioritaskan untuk diimplementasikan.

Untuk melihat apakah proyek yang diajukan oleh sebuah negara „layak“ atau tidak untuk dibiayai, maka diperlukan semacam studi yang mendalam akan proyek tersebut. Biasanya pemerintah Jepang (diwakili oleh JICA) akan mengirim ahli-ahli (yang terkait dengan bidang proyek yang akan dibantu) untuk melakukan studi lapangan di negara yang mengajukan bantuan tersebut.

Dalam studinya, mereka juga sering kali berkonsultasi dengan pihak-pihak lainnya, seperti personil JICA yang terdapat di negara tersebut dan juga institusi pemerintah negara berkembang yang terkait dengan bidang bantuan tersebut. Untuk Indonesia, seperti BAPPENAS (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional) atau kementerian yang terkait. Setelah studi berhasil dilakukan maka hasil studi akan kembali didiskusikan oleh pemerintah Jepang mengenai bentuk ODA yang akan disalurkan, dengan pemerintah negara penerima. Keputusan akhir ini kemudian menjadi blueprint dari ODA yang akan diimplementasikan. Masing-masing pihak akan menerima draft rancangan bentuk ODA tersebut. Kedua, tahap Approval dimana setelah rancangan ODA tersebut disetujui, maka akan langsung dimasukkan ke JICA sebagai bentuk pengajuan untuk meminta bantuan JICA dalam mengimplementasikan rancangan yang telah disepakati. Kementerian yang terkait, kemudian turut serta untuk membahas cara pengimplementasian ODA.

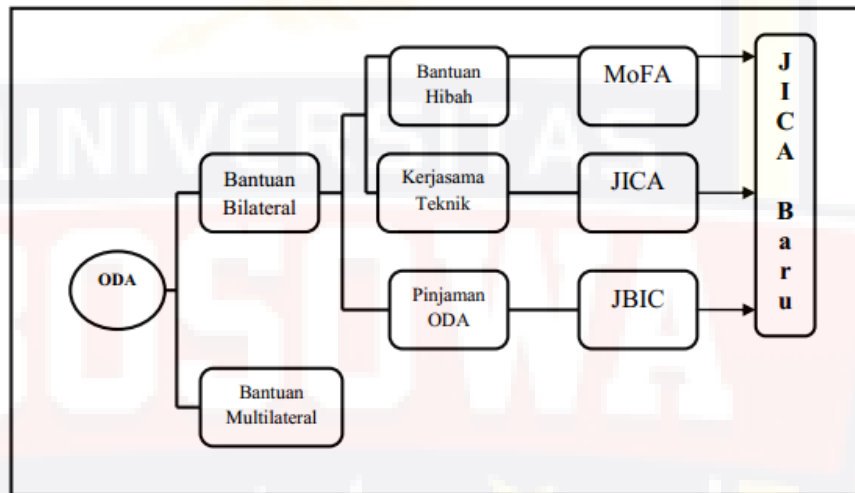
Setelah disepakati mengenai cara pengimplementasiannya, maka rancangan dari ODA yang ada kemudian akan mendapatkan persetujuan dari kabinet, sebagai bentuk formalitas bahwa pengajuan ODA telah diterima dan disetujui oleh pemerintah Jepang. Ketiga, adalah tahap Implementation yang diawali dengan adanya kesepakatan bilateral antara Jepang dengan negara yang akan menerima ODA nya. Kemudian disusul oleh pembahasan mengenai masalah-masalah teknis dalam pengimplementasiannya, seperti kontrak untuk konsultannya, kontrak untuk pembiayaannya (bank) serta kontrak yang dengan masalah konstruksinya. Tahap implementasi kemudian diakhiri dengan pembangunan proyek ODA yang diajukan tersebut. Keempat adalah tahap Operation dan Evaluation. Merupakan tahap terakhir, dimana pemerintah Jepang akan melihat apakah proyek ODA yang telah diimplementasikan berjalan dengan semestinya serta melakukan evaluasi mengenai dampak pelaksanaan proyek yang ada.

JICA merupakan institusi resmi Jepang yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kerjasama teknis dengan negara-negara berkembang berdasarkan atas kesepakatan bilateral antar pemerintah secara resmi. Seperti yang telah dijabarkan sebelumnya (lihat kembali bagan 3.2) bahwa pada awal berdirinya, JICA hanya memiliki fungsi sebagai lembaga kerjasama yang secara khusus bertugas untuk menyalurkan bantuan teknik saja. Namun pada bulan Oktober 2008, JICA melakukan merger dengan bagian operasi kerjasama ekonomi luar negeri dari JBIC (*Japan Bank for International Cooperation*) menjadi JICA baru. Sejak saat itu JICA mendapatkan tugas untuk melaksanakan tiga bentuk

bantuan ODA yaitu bantuan hibah, kerjasama teknik dan pinjaman ODA. Tujuan dari pembentukan JICA sejak awal adalah untuk mempromosikan kerjasama internasional bagi pembangunan ekonomi dan sosial negara-negara berkembang. Secara lebih sederhana berikut ini gambaran penyaluran ODA melalui JICA baru.

Bagan 3.3

Penyaluran Bantuan ODA Melalui JICA Baru



Sumber: Buletin JICA di Indonesia 2012, hal. 9.

Berdasarkan table diatas, JICA dengan format yang baru bertanggung jawab dalam menyalurkan bantuan hibah, kerjasama teknik serta pinjaman ODA. Meskipun dalam bagan digambarkan bahwa bantuan hibah disalurkan melalui JICA, akan tetapi beberapa jenis bantuan hibah akan tetap diberikan langsung oleh MoFA (DEPLU Jepang melalui kantor Kedutaan Besar) dalam rangka kebijakan diplomatik. dampak positif yang ditimbulkan dengan adanya perubahan ini yaitu JICA Baru mengimplementasikan kerjasama teknis, pinjaman ODA dan bantuan hibah secara terpadu sehingga dianggap dapat mensinergikan ketiga skema bantuan ini secara efektif untuk dapat

menyediakan bantuan yang paling tepat mengangkat permasalahan mitra kerja. Walaupun telah terjadi perubahan dalam bentuk bantuan yang disalurkan oleh JICA, hal ini tidak merubah tujuan dari pembentukan JICA sejak awal yaitu untuk mempromosikan kerjasama internasional bagi pembangunan ekonomi dan sosial negara-negara berkembang.

Seiring dengan adanya pembentukan JICA baru, JICA telah meluncurkan visi dan misinya yang baru sekaligus menyatakan pencapaiannya melalui penganangan beberapa strategi utamanya. Adapun visi dan misi serta strategi utamanya adalah sebagai berikut:

a. Visi JICA

JICA meluncurka visinya yang baru yaitu “Pembangunan yang inklusif dan dinamis.” Dalam artian, JICA akan berusaha mempromosikan pembangunan yang berdampak pada pengurangan kemiskinan dan meningkatnya pertumbuhan ekonomi di beberapa negara berkembang.

b. Misi JICA

Terdapat empat misi yang dicetuskan oleh JICA yaitu sebagai berikut:

1. Fokus pada agenda global, pemanfaatan pengalaman dan teknologi yang dimiliki Jepang secara maksimal, sebagai bagian dari masyarakat internasional, dengan memfokuskan perhatiannya pada berbagai permasalahan global yang dihadapi oleh negara-negara berkembang secara menyeluruh, seperti perubahan iklim, air, energi, pangan, penyakit menular, dan keuangan.
2. Pengentasan kemiskinan melalui pertumbuhan yang berkeadilan, yaitu dengan menyediakan dukungan terhadap pengembangan SDM

(Sumber Daya Manusia), pengembangan kapasitas, peningkatan kebijakan dan institusi, serta penyediaan prasarana sosial dan ekonomi.

3. Penguatan tata kelola pemerintahan, menawarkan bantuan bagi peningkatan berbagai pranata/perangkat dasar yang dibutuhkan oleh sebuah pemerintahan, serta berbagai sistem pelayanan umum yang didasarkan atas kebutuhan masyarakat secara efektif, serta dukungan bagi pengembangan institusi dan SDM yang diperlukan untuk mengelola berbagai pranata tersebut.
4. Pencapaian ketahanan manusia, mendukung berbagai upaya dalam rangka peningkatan kapasitas sosial dan institusi serta peningkatan kemandirian dan kemampuan diri manusia dalam menghadapi berbagai ancaman dan membangun masyarakat untuk dapat hidup secara bermartabat.

c. Strategi Utama JICA

Terdapat empat pilar strategi utama JICA dalam menyatakan komitmen pencapaiannya yaitu sebagai berikut:

1. Bantuan yang terintegrasi, melaksanakan pengelolaan bantuan yang terintegrasi dari seluruh skema yang ada termasuk kerjasama teknik, pinjaman ODA dan bantuan hibah agar dapat memberikan dukungan secara menyeluruh meliputi elemen seperti peningkatan kebijakan dan institusi di beberapa negara berkembang termasuk pengembangan SDM dan pengembangan kapasitas serta perbaikan prasarana.

2. Bantuan yang berkesinambungan, mensinergikan berbagai pendekatan bantuan agar dapat memberikan dukungan yang berkesinambungan serta dukungan untuk pembangunan dalam kerangka jangka menengah dan panjang.
3. Promosi terhadap kemitraan dalam pembangunan, dalam artian diharapkan JICA dapat menjadi mitra yang baik bagi negara-negara berkembang dengan mempromosikan kemitraan pemerintah-swasta serta memperkuat kemitraan dengan pihak pemerintah lokal, perguruan tinggi, LSM (lembaga swadaya masyarakat) dan lembaga donor lainnya.
4. Peningkatan penelitian dan berbagi pengetahuan (knowledge-sharing), pusat penelitian JICA telah dibentuk dalam rangka menciptakan nilai-nilai pengetahuan baru di bidang bantuan pembangunan internasional, meningkatkan kemampuan JICA dalam bidang penelitian dan knowledgesharing serta secara aktif melaksanakan berbagai studi dan penelitian yang difokuskan pada berbagai topik dalam konteks regional dan berbasis isu pembangunan.

2. Keberadaan JICA Di Indonesia

Sejak tahun 1954 Jepang telah melakukan kerjasama dengan Pemerintah Indonesia diawali dengan kerjasama teknik seperti pengiriman tenaga ahli dari Jepang dan program pelatihan yang dilaksanakan secara langsung di negara Jepang. Kerjasama tersebut berlanjut hingga tahun 1970-an dan pada tahun 1974 pemerintah Jepang secara resmi membentuk JICA

untuk menjalankan kerjasama Teknik. Sejak saat itu, dimulailah kerjasama Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Jepang melalui JICA. Kantor perwakilan JICA di Indonesia pada awalnya merupakan kantor perwakilan dari Badan Kerjasama Teknik Luar Negeri atau OTCA (*Overseas Technical Cooperation Agency*) yang kemudian berubah nama menjadi Badan Kerjasama Internasional Jepang atau JICA (*Japan International Cooperation Agency*).

Kantor Perwakilan JICA di Indonesia didirikan pada tahun 1969. JICA di Indonesia merupakan salah satu yang tertua dan terbesar di antara sekitar 150 kantor perwakilan JICA yang tersebar di seluruh dunia. Indonesia merupakan salah satu negara penerima bantuan hibah bilateral Jepang terbesar berdasarkan besaran jumlah dana yang telah disalurkan secara kumulatif sampai TA Jepang 2007 dimana telah terkirim 35.630 peserta Indonesia untuk mengikuti program pelatihan di Jepang dan 11.108 tenaga ahli Jepang telah ditugaskan di Indonesia. Dalam melakukan kerjasamanya, pihak JICA selalu mempertimbangkan kebijakan pemerintah negara-negara penerima bantuan terlebih dahulu. Untuk penyaluran bantuan ODA di Indonesia, pemerintah Jepang mengacu pada strategi bantuan untuk pembangunan Indonesia atau yang dikenal dengan CAS (*Country Assistance Strategy*). CAS disusun sesuai dengan arahan yang tercatum dalam RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah). Adapun strategi bantuan tersebut mengacu pada pencapaian tiga pilar tujuan pembangunan utama yaitu pertumbuhan berkelanjutan yang digerakkan oleh sektor swasta, pembangunan masyarakat yang demokratis

dan berkeadilan serta perdamaian dan stabilitas dan berupaya membantu semaksimal mungkin inisiatif pemerintah Indonesia dalam mendorong kemandiriannya dalam pembangunan.

Bagan 3.4
Korelasi CAS (*Country Assistance Strategy*) dan RPJM
(Rencana Pembangunan Jangka Menengah)



Berdasarkan pada bagan diatas dapat dilihat bahwa penyusunan CAS (*Country Assistance Strategy*) oleh Jepang ini disesuaikan dengan adanya RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) dalam pembangunan Indonesia. CAS yang dibuat oleh JICA dititik beratkan pada empat bidang prioritas kerjasama. Bidang prioritas kerjasama tersebut berupa kesinambungan gerakan pertumbuhan yang digerakkan oleh sektor swasta, menciptakan masyarakat yang demokratis dan berkeadilan, perdamaian dan stabilitas serta pembangunan yang komprehensif. Adapun penjabaran prioritas kerjasama JICA di Indonesia tersebut adalah sebagai berikut:

Table 3.1
Prioritas Kerjasama JICA di Indonesia

CAS (Country Assistance Strategy) Jepang	Prioritas Kerjasama JICA di Indonesia	Program
Pertumbuhan Berkelanjutan yang digerakkan oleh sektor swasta	Pertumbuhan berkelanjutan yang digerakkan oleh sektor swasta	Kebijakan ekonomi, fiskal dan keuangan
		Dukungan pembangunan prasarana ekonomi
		Dukungan pembangunan sektor swasta
Masyarakat demokratis dan berkeadilan	Mendukung reformasi tata pemerintahan	Reformasi kepolisian nasional (POLRI)
	Penanggulangan kemiskinan	Dukungan pemenuhan pelayanan minimum dan MDGs
	Pelestarian lingkungan	Pelestarian Lingkungan
Perdamaian dan stabilitas	Mendukung perdamaian dan stabilitas	Perdamaian dan rekonstruksi bangunan
Pembangunan komprehensif	Pembangunan Daerah	Pembangunan Indonesia Timur: 1. Sulawesi Selatan 2. Indonesia Timur Laut

Sumber: Presentasi JICA Makassar Field Office: "Kerjasama JICA di Indonesia Timur" Februari 2011, hal. 20.

3. Keberadann JICA Di Sulawesi Selatan

JICA telah mendirikan Kantor Lapangan di Makassar atau Makassar Field Office (MFO) pada 1 April 2006 yang mengelola program melalui kolaborasi, komunikasi dan koordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Provinsi (BAPPEDA) Sulawesi Selatan. Pada tabel diatas salah satu program yang menjadi fokus JICA adalah Pembangunan Indonesia Wilayah Timur yang mencakup Sulawesi Selatan dan Indonesia Timur Laut.

Hal ini dikarenakan, seperti yang kita ketahui bahwa di Indonesia masih terdapat kesenjangan antar daerah, khususnya di wilayah bagian timur Indonesia dalam hal pembangunan infrastruktur di berbagai sektor. Sesuai dengan kebijakan desentralisasi di Indonesia, JICA berfokus pada pembangunan daerah yang dimulai dengan menyeleksi daerah model (daerah prioritas) untuk mengimplementasikan bantuan yang lebih terpadu dan

efektif. Sehingga pada tahun 2006, pihak ODA Jepang dan instansi yang terkait di Indonesia membentuk “Program Pembangunan”.

JICA telah menjalin kerjasama dengan pihak pemerintah provinsi Sulawesi Selatan sejak tahun 1980-an di berbagai sektor. Sulawesi Selatan memiliki potensi yang besar, sehingga dibentuk “Program Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan” (SSRDP) dan M/M (Minutes of Meeting) tentang konsep pelaksanaan program yang ditandatangani oleh Gubernur Sulawesi Selatan dan Pihak Kedutaan Besar Jepang pada tanggal 11 Mei 2006. Misi utama keberadaan JICA di Sulawesi Selatan adalah untuk melaksanakan beberapa program yang didedikasikan untuk peningkatan pengentasan kemiskinan melalui pembangunan daerah serta pemberdayaan masyarakat sosial. Berikut ini merupakan penjabaran mengenai program dukungan pembangunan oleh JICA di Provinsi Sulawesi Selatan:

- a. Pembangunan Perkotaan Mamminasata. Program ini fokus di beberapa kota di Sulawesi Selatan yaitu Makassar, Maros, Sungguminasa dan Takalar yang berupa pembangunan perkotaan sebagai kekuatan pendorong bagi perkembangan regional provinsi. Melalui program ini, pihak JICA dan pemerintah provinsi melaksanakan beberapa proyek yaitu antara lain Studi Implementasi Tata Ruang Terpadu Wilayah Metropolitan Mamminasata yang berlangsung pada April 2005 sampai dengan Juni 2006, Dukungan Khusus Formasi Proyek untuk Proyek Peningkatan Manajemn Limbah Padat di Wilayah Mamminasata pada tahun 2008, Proyek Peningkatan Manajemen Pembangunan Perkotaan Wilayah Metropolitan Mamminasata yang berlangsung pada April 2009 sampai

dengan Februari 2012 dan Proyek Peningkatan Layanan Air Bersih di Wilayah Metropolitan Mamminasata pada tahun 2009.

- b. Peningkatan Pemberdayaan Sosial Dengan adanya program ini diharapkan dapat meningkatkan pemberdayaan masyarakat pada bidang yang dianggap vital dalam kehidupan bermasyarakat yaitu kesehatan dan pendidikan. Pada bidang kesehatan dibentuk Program Peningkatan Kapasitas Manajemen Kesehatan Kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan (PRIMA Kesehatan) yang berlangsung pada Februari 2007 sampai dengan Februari 2010. Dengan adanya respon positif dari masyarakat maka dibentuklah PRIMA Kesehatan Fase 2 yang berlangsung pada November 2010 sampai dengan Maret 2014. Sedangkan pada bidang pendidikan, dibentuk proyek Rencana Terpadu Peningkatan Pendidikan Menengah Pertama di Provinsi Sulawesi Selatan (PRIMA Pendidikan) yang berlangsung pada Desember 2007 sampai dengan November 2010.
- c. Pembangunan yang Berimbang di Seluruh Wilayah Program ini bertujuan untuk meningkatkan pembangunan yang berimbang di seluruh wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Dengan melalui program ini, diharapkan agar tidak terdapat lagi kesenjangan yang tinggi antar daerah. Adapun proyek yang dihasilkan melalui program ini adalah Proyek Kerjasama Teknis Fasilitasi Pengembangan Industri di Provinsi Sulawesi Selatan yang berlangsung pada maret 2009 sampai dengan februari 2012. Dalam proyek ini JICA memberikan bantuan tekniknya berupa tenaga ahli serta pelatihan dalam penanganan keuangan, manajemen serta pemasaran pada produk yang berbasis lokal industri.

BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Kerjasama Pembangunan Internasional JICA (*japan international cooperation agency*) Dalam Pengembangan Komoditas Sutra Di Sulawesi Selatan

Kerjasama pengembangan komoditas sutra antara JICA dan pemerintah provinsi Sulawesi selatan sudah berlangsung sejak lama. Kerjasama teknis ini dilakukan karena pertumbuhan industri manufaktur di Sulawesi selatan mengalami stagnasi dikarenakan kurangnya informasi pasar, kurangnya kerjasama antara pemerintah dan industri terkait. Sehingga proyek tersebut bertujuan untuk membangun sistem di mana pemangku kepentingan terkait dapat berkolaborasi untuk produk/pengembangan pasar dengan memanfaatkan sumber daya lokal yang tersedia, sehingga berkontribusi pada percepatan pembuatan sumber daya lokal dan peningkatan nilai produk. Sehingga dapat meningkatkan sektor perekonomian dan sosial Sulawesi selatan. Berdasarkan konsep kerjasama pembangunan internasional menurut Stephan Klingebiel kerjasama pembangunan bertujuan membantu Negara lain dalam meningkatkan sektor ekonomi dan sosialnya.

Sehingga untuk mengetahui bagaimana model kerjasama pembangunan internasionalnya dapat dilihat dalam point berikut:

A. Kerjasama Harus Diberikan Kepada Negara Berkembang.

Disini penulis mengkategorikan Indonesia sebagai sebuah Negara berkembang yang dimana rentan terhadap sektor sosio-ekonominya.

Indonesia merupakan salah satu Negara yang banyak menerima bantuan luar negeri dari berbagai Negara-negara maju. Salah satunya yaitu Jepang yang melalui agen kerjasama yaitu JICA dalam menyalurkan bantuan luar negerinya. JICA sendiri sebagai badan kerjasama internasional Jepang yang berfokus membantu Negara-negara berkembang dalam meningkatkan infrastruktur ekonomi sebuah Negara, pengurangan tingkat kemiskinan dan pemberdayaan sumber manusia. Sesuai dengan visinya yaitu pembangunan yang inklusif dan dinamis yang berarti JICA konsisten dalam mempromosikan pembangunan yang berdampak pada peningkatan ekonomi dan pengurangan kemiskinan. Kerjasama yang diinisiasi JICA dalam menyalurkan bantuan luar negerinya terdapat beberapa tipe yaitu, kerjasama teknis, pinjaman dan hibah. Dalam upaya peningkatan komoditas sutera di Wajo Sulawesi selatan, JICA melakukan kerjasama teknis dengan pemerintah provinsi dalam memfasilitasi pengembangan industri lokal. Dalam kerjasama ini memiliki beberapa kegiatan utama antara lain, meningkatkan strategi pembangunan industri Sulawesi selatan dan menyusun peraturan perundang-undangan tentang pembangunan industri, serta melakukan pelatihan mengenai keuangan, pemasaran produk dan manajemen produk. Dengan mendatangkan beberapa tenaga ahli dan melakukan pelatihan dalam pengembangan produk yang berbasis lokal.

B. Bantuan Harus Kondusif Bagi Kemajuan Ekonomi Atau Kemajuan Standar Hidup Masyarakat.

Dari laporan hasil proyek pengembangan industri berbasis lokal provinsi Sulawesi selatan, hasil analisis penulis yaitu pemerintah konsisten

dengan kebijakan pembangunan regional, memperkuat daya saing ekonomi secara global dan pengembangan industri pengolahan Sulawesi selatan. dari data bps kab. Wajo 2014-2018 terjadi peningkatan pada unit usaha, tenaga kerja, serta nilai produksinya. Yang dimana hal tersebut sejalan dengan undang-undang no. 3 tahun 2014 tentang perindustrian yang meletakkan industri sebagai salah satu sektor yang memberikan dampak atau peran yang cukup besar dalam perekonomian. Roda perekonomian Sulawesi selatan di tunjang oleh dua sektor antara lain, sektor pertanian dan sektor industri. Untuk itu dalam memajukan sektor industri Sulawesi selatan ditetapkan sebuah peraturan daerah (PERDA) no. 7 tahun 2018 tentang pembangunan industri Sulawesi selatan. yang menyatakan bahwa komoditas sutra menjadi salah satu program utama dalam pembangunan industri.

JICA memiliki peran penting dalam peningkatan sosio-ekonomi provinsi Sulawesi selatan khususnya di kabupaten Wajo, yang dimana dalam proyek memfasilitasi pengembangan industri yang berbasis lokal JICA mendatangkan beberapa tenaga ahli serta melakukan pelatihan mengenai keuangan, manajemen produk serta pemasaran produk. Proyek pengembangan industri lokal provinsi Sulawesi selatan, telah mendukung pembentukan kelembagaan dan kebijakan untuk mempromosikan strategi merek, penguatan sistem dukungan dan pola kegiatan untuk pengembangan produk ciri khas daerah antara lain, sirup markisa bebas aditif, coklat yang menggunakan 100% kakao dari Sulawesi, dan produk sutra dengan pewarna alami. Peningkatan pada industri tenun kabupaten Wajo sendiri terjadi pada

tiga tahun terakhir yaitu pada tahun 2016-2018. Pada tahun 2016 mampu memproduksi sebanyak Rp 165.731.665 dan memiliki unit usaha sebanyak 5.940 unit serta 18.308 tenaga pekerja. Dan meningkat pada tahun 2017 sebanyak Rp 165.944.325 nilai produksi dan 6.903 unit usaha serta 18.510 tenaga kerja. Meskipun tenaga kerja pada tahun 2018 tetap pada angka 18.510 tetapi pada unit usaha naik sebanyak 6.116 unit dan mampu memproduksi sebanyak Rp 169.536.165.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dalam penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa JICA (*Japan international cooperation agency*) telah melakukan kerjasama teknis dengan memberikan berupa bantuan teknis dan pelatihan dalam proyek fasilitasi pengembangan industri yang berbasis lokal di Wajo Sulawesi selatan. serta bekerjasama dengan pemerintah Sulawesi selatan meluncurkan sebuah program yaitu “Gerakan Pembangunan Ekonomi Masyarakat” (GERBANG EMAS) yang salah satu targetnya yaitu pengembangan industri sutra Sulawesi selatan.

B. Saran

1. Penulis menyarankan kepada pemerintah Provinsi Sulawesi selatan untuk memanfaatkan sebaik mungkin bantuan-bantuan yang telah pihak lain berikan. Seperti CIDA, USaid, JICA dan sebagainya. Sehingga pembangunan infrastruktur, peningkatan pada sektor-sektor tertentu dan mampu meminimalisir angka kemiskinan.
2. Penulis juga menyarankan kepada pemerintah kabupaten baik daerah target maupun tidak, untuk tetap konsisten dalam pemberdayaan masyarakat baik dengan adanya bantuan tersebut maupun tidak.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriana Reski Anwar, (2014). *“Skripsi Analisis Bantuan JICA (Japan International Cooperation Agency) Pada Bidang Kesehatan Di Sulawesi Selatan”*
- Besse sulfiana akil, skripsi *“analisis penyerapan tenaga kerja industri tenun sutera di desa pakanna kecamatan tassisolok kabupaten wajo”* 2019.
- Daniel, 2011, sulsel-jica kerjasama fasilitasi industri lokal, antara news, *“<https://makassar.antaranews.com/berita/23881/sulsel-jica-kerja-sama-fasilitasiindustri-lokal>”*, diakses pada 25 desember 2022 pada pukul 21:50 WITA.
- Dasriyanti, N. (2018). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Tenaga Kerja Industri Kain Tenun Sutera di Kabupaten Wajo* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar)
- Dr. H. Amran Mahmud, S.Sos.,M.Si. et, al. (2020), *“tenun sutera sengkang”* <http://103.150.169.52/jenis/2/pengetahuan-tradisional/4701/tenun-sutera-sengkang>, di akses pada 03 Februari 2023.
- HAR|IS R, A. B. D. U. L. (2013). *Analisis Penyerapan Tenaga Kerja Industri Tenun Sutera di Kabupaten Wajo* (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).
- Iwang, B., & Sudirman, S. (2020). Peranan Pemerintah dalam Memajukan Perusahaan Sutera di Sulawesi Selatan, Indonesia. *Southeast Asian Social Science Review*, 5(1), 103-132.
- JICA, *mission statmant*, *“<https://www.jica.go.jp/english/about/mission/index.html>”* diakses pada 02 Februari 2023.
- JICA, sejarah kerjasama pembangunan Indonesia- Jica, *“https://www.jica.go.jp/english/publications/brochures/pdf/indonesia_01_IN.pdf”* diakses pada 02 Februari 2023.
- JICA, *the project for development of industry based on lokal resources in south sulawesi province*,
“https://www2.jica.go.jp/en/evaluation/pdf/2016_0701852_4_f.pdf” diakses pada 18 januari 2023.
- JICA,2015, studi awal tentang kebijakan pengembangan daerah di Indonesia, *“<https://openjicareport.jica.go.jp/pdf/12245205.pdf>”* diakses pada 02 Februari 2023. Hal.30.

- Ksi. (2020). About ksi, <https://www.ksi-indonesia.org/assets/uploads/original/2020/10/ksi-1603790104.pdf>. Di akses padatanggal 31 januari 2023.
- Rahayu, R. (2021). *Pensuteraan Di Kampung Sutera BNI Desa Pakka/N Kecamatan TaNasitolo Kabupaten Wajo, 2011-2019* (Doctoral dissertation, Universitas Negeri Makassar).
- Rizqi Rahman Saputra, 'Bantuan Japan International Cooperation (JICA) Dalam Mengatasi Sampah Di Balikpapan Tahun 2014-2017. (2019)
- Sadapotto, A. (2012). *Proses kebijakan persuteraan alam di Sulawesi Selatan. Perennial*, 8(1), 1-5.
- _____ (2004). Kerjasama dalam pengembangan sutera di Sulawesi Selatan. *Institut Pertanian Bogor*.
- Sadapotto, A., Salindeho, Y. M., Palulungan, L., Yahya, A. F., Riwu, M., Mulyani, A., ... & Pratama, Y. F. (2019). *Laporan Kajian Rantai Nilai Komoditas Sutera Sulawesi Selatan*. Hal. 18-20.
- Sitti Navisah Muhidin, skripsi "peran *Japan international cooperation agency* (JICA) Dalam Proses Rekontruksi Infrastruktur Daerah Palu Pasca Tsunami di Palu tahun 2018" (2021).
- Stephan Klingebiel (2014). *What is development cooperation?*, development cooperation, hal. 2-3.
- Syukur, M. (2014). Transformasi Penenun Bugis-Wajo Menuju Era Modernitas. *Paramita: Historical Studies Journal*, 24(1).
- Tenriawaru, A. N., Fudjaja, L., Jamil, M. H., Rukka, R. M., & Anisa, A. (2021, July). Natural silk agroindustry in Wajo Regency. In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* (Vol. 807, No. 3, p. 032057). IOP Publishing.
- wajokab.go.id (2023), kondisi geografi kabupaten Wajo "https://wajokab.go.id/page/detail/kondisi_geografi" diakses pada 03 Februari 2023.
2012. Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, "Program kerja Direktorat Jenderal Kejasama Industri Internasional T.A. 2012", h. 22.